BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah *Non* Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala BPN (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006). Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, *regional* dan *sektoral* [1]. Dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) memliliki beberapa bidang atau Deputi seperti Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan (SPP), Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP), Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM),dan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PPSKP) [2].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sri Mujitono, SH, MH selaku Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertahanan (PPP), menyatakan bahwa dana kegiatan untuk setiap bidang dicairkan oleh Menteri Keuangan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dana kegiatan itu boleh dilakukan untuk kegiatan apa saja, namun apabila kegiatan yang dilakukan telah selesai maka harus dibuatkan sebuah Petunjuk Operasional Kegitan (POK) agar dana kegiatan tersebut dapat dicairkan**,** karena ketika kegiatan berlangsung dana yang digunakan adalah dana dari masing – masing anggota pelaksana kegiatan.

Kepala Bidang PPP dalam pengawasan penggunaan dana operasional kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan akhir dan laporan triwulan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali yang mengakibatkan Kepala Bidang PPP kesulitan dalam melihat tingkat keberhasilan dari kegitan – kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, dana yang dicairkan oleh Menteri Keuangan untuk setiap kegiatan yang berdasarkan POK yang telah buat oleh bendahara dilakukan dengan cara membandingkan kwitansi pembayaran di setiap butir – butir

anggaran, karena banyaknya anggaran terkadang Bendahara melakukan kesalahan dalam perhitungannya sehingga laporan POK tersebut tidak sesuai dengan surat DIPA yang mengakibatkan Kepala Bidang PPP kesulitan untuk mengetahui jumlah dana kegiatan yang telah dicairkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Bidang PPP membutuhkan sebuah sistem yang dapat memonitoring penggunaan dana kegiatan. Diharapkan dengan adanya sistem monitoring penggunaan dana POK ini dapat mencegah adanya penyelewengan dana kegitan pada bidang PPP.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana membangun Sistem Monitoring Penggunaan Dana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah membangun Sistem Monitoring Penggunaan Dana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat.

Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan Sistem Monitoring Penggunaan Dana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat ini adalah:

1. Mempermudah Bendahara Bidang PPP dalam mencatat rekapitulasi POK, laporan triwulan dan laporan akhir.
2. Mempermudah Kepala Bidang PPP untuk mengetahui jumlah dana kegiatan yang telah dicairkan oleh Menteri Keuangan.
3. Mempermudah Kepala Bidang PPP untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan.

1.4 Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini memiliki cakupan yang luas maka diperlukan suatu batasan masalah agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Batasan – basatan masalahnya adalah :

1. Sumber data berasal dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat.
2. Data yang akan diolah pada sistem *monitoring* ini adalah data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), data laporan triwulan dan data laporan akhir.
3. Indikator sebagai ukuran yang digunakan untuk memonitoring adalah laporan akhir dan laporan triwulan.
4. Proses yang terdapat pada sistem ini adalah :
   a. Pengelolaan data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
   b. Pengelolaan data laporan triwulan.
   c. Pengelolaan data laporan akhir.
5. Keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem *monitoring* ini adalah :
   a. Informasi data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
   b. Informasi hasil monitoring laporan triwulan.
   c. Informasi hasil monitoring laporan akhir.
6. Durasi kegiatan dilakukan bulanan, dimana diasumsikan dalam 1 bulan adalah 30 hari.
7. Data yang digunakan untuk memonitoring diambil dari *history* data POK tahun 2013.
8. Teknik yang akan digunakan untuk menampilkan data dalam membangun sistem *monitoring* ini adalah teknik *dashboard*.
9. *Tools* yang digunakan dalam membangun perangkat lunak tersebut menggunakan *Adobe Dreamweaver* CS5 dan *WampServer* karena sistem monitoring yang akan dibangun ini berbasis *website*.
10. Perangkat lunak yang akan dibangun ini hanya digunakan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat di bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP).

11. Perangkat lunak yang akan dibangun ini hanya membahas tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada bidang kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Potensi Objek Konsolidasi Tanah dan Neraca Penatagunaan Tanah saja.
12. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun perangkat lunak ini adalah *PHP*, *HTML* dan *Javascript*.
13. Pengolahan *database* yang yang digunakan untuk membangun perangkat lunak ini adalah *MySQL*.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan fakta-fakta dan informasi dalam situasi atau kejadian dimasa sekarang secara sistematis, faktual dan akurat. Metodologi penelitian ini memiliki dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode pembangunan perangkat lunak.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan referensi-referensi yang telah diperoleh. Cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

   Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian ke Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Barat. Studi lapangan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

   a. Observasi

      Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung ke Bidang Pengaturan dan Penataan

Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertahanan (PPP).

2. Studi Literatur

Studi Literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan proses pencarian, membaca, serta mengenai *website* yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan laporan.

1.5.2 Metode Pembuatan Perangkat Lunak

Metode yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak ini menggunakan model *waterfall* seperti pada Gambar 1.1. Model ini adalah model klasik yang melakukan pendekatan secara sistematis, berurutan dalam membangun *software* berkat penurunan dari satu fase ke fase lainnya. Tahap dari model ini adalah sebagai berikut:

1. *Communication*

   Tahap *communication* merupakan analisis terhadap kebutuhan *software* dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan Administrator, Kepala Bidang PPP, Bendahara Bidang PPP, maupun mengumpulkan data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun internet.

2. *Planning*

   Tahap *planning* merupakan lanjutan dari proses *communication (analysis requirement).* Tahap ini akan menghasilkan dokumen *user requirement* atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan kebutuhan pengguna dalam pembuatan *software,* termasuk rencana yang akan dilakukan.

3. *Modeling*

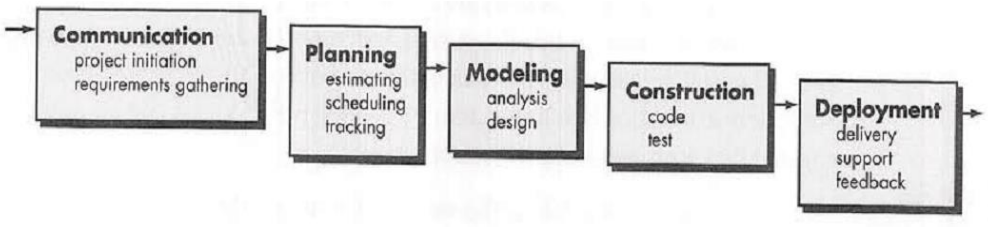
   Tahap *modeling* akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan *software* yang dapat diperkirakan sebelum dibuat *coding*. Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut *software requirement.*

4. *Construction*

   Tahap *construction* merupakan proses pembuatan kode. *Coding* atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. *Programmer* akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh *user*. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu *software*, artinya dalam tahapan ini penggunaan komputer akan dimaksimalkan. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan *testing* terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan *testing* adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.

5. *Deployment*

   Tahap *deployment* bisa dikatakan *final* dari pembuatan *software* atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh pengguna. Kemudian *software* yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.



Gambar 1. 1 Model *Waterfall* [3]

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan teori – teori yang berkaitan dengan pembangunan perangkat lunak yang akan dibangun.

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menguraikan tentang analisis prosedur sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan *non*-fungsional, analisis kebutuhan fungsional, perancangan basis data, perancangan antarmuka, perancangan struktur menu, perancangan pesan dan jaringan semantik.

BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas tentang hasil implementasi sistem ke dalam program dan pengujian dari sistem yang telah diimplementasikan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir dan saran untuk perbaikan hasil dari penelitian.